

Kinerja Keuangan dan Klasterisasi 8 Provinsi Maritim di Indonesia

Financial Performance and Clustering 8 Maritime Provinces in Indonesia

*Ardiansyah¹, Diana Nurindrasari²

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

²Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia

Email: ardiansyah29th@umrah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah provinsi maritim yang tergabung dalam BKSDK serta klasterisasi kinerja keuangan berdasarkan 3 wilayah Indonesia, yakni Wilayah Indonesia Barat (WIB), Wilayah Indonesia Tengah (WITA), dan Wilayah Indonesia Timur (WIT). Pendekatan penelitian ini kuantitatif, menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2023 pada 8 provinsi maritim, dengan menghitung rasio kemandirian daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian secara rerata keseluruhan pada level rendah menuju sedang, namun pada klaster wilayah memiliki level berbeda. Rasio keserasian daerah secara rerata keseluruhan dan klasterisasi memiliki tingkat keserasian yang baik. Sementara itu, rasio pertumbuhan, baik secara keseluruhan rerata maupun klasterisasi mengalami penurunan.

Kata Kunci: kinerja keuangan, klasterisasi, provinsi maritim

ABSTRACT

This research aims to examine the regional financial performance of maritime provinces that are members of the BKSDK as well as clustering financial performance based on 3 Indonesian regions, namely the Western Indonesia Region (WIB), the Central Indonesia Region (WITA), and the Eastern Indonesia Region (WIT). This research approach is quantitative using data from the 2022- 2023 Budget Realization Report (LRA) in 8 maritime provinces by calculating the regional independence ratio, harmony ratio, and growth ratio. The results of the research show that the overall average independence ratio of independent provinces is at a low to medium level, but the regional clusters have different levels. The overall average regional compatibility ratio and clustering have a good level of compatibility. Meanwhile, the growth ratio, both overall average and clustered has decreased.

Keywords: financial performance, clustering, maritime provinces

PENDAHULUAN

Sejak dibentuknya Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan (BKSDK), telah memunculkan penamaan tersendiri untuk delapan provinsi yang bernaung di dalamnya. Kedelapan provinsi tersebut adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara (Kelen, 2019). Memang, BKSDK tidak menyebutkan diri sebagai provinsi kepulauan, namun kelembagaan tersebut turut berupaya dalam mendorong peningkatan pembangunan di wilayah kemaritiman. Dengan demikian, pada artikel ini kami meminjam istilah "Provinsi Maritim" untuk merujuk kepada provinsi-provinsi yang tergabung dalam BKSDK. Dengan terbentuknya BKSDK pun diharapkan menjadi tumpuan dalam mendorong terwujudnya Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dalam pandangan anggota BKSDK, Undang-Undang Daerah Kepulauan memiliki urgensi sekaligus menjadi tolak ukur dalam peningkatan kesejahteraan daerah-daerah kepulauan di Indonesia (<https://kepriprov.go.id>).

Peningkatan kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur dari kinerja keuangan daerah tersebut (Hilmawan et al., 2023). Hal tersebut menggambarkan tingkat ketercapaian program kerja pemerintah daerah yang telah direalisasikan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan pada periode tertentu (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Berdasarkan dialog pada Forum Daerah Kepulauan Tahun 2023 bahwa kinerja pembangunan delapan provinsi maritim yang tergabung dalam BKSDK masih di bawah kinerja nasional (<https://kepriprov.go.id>). Kinerja daerah pada dasarnya bersifat multidimensional (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Namun kinerja keuangan juga menjadi unsur fundamental yang penting dalam mencapai kinerja daerah (Wibawa et al., 2023). Dengan demikian, kajian mendalam melalui pengukuran kinerja menjadi urgensi yang tinggi. Terutama melihat kondisi pemerintah pusat juga terus mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan masing-masing daerahnya, salah satunya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Selain itu, kinerja keuangan daerah juga perlu dikaji secara mendalam dengan tujuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan alur yang berpedoman pada laporan keuangan pemerintah daerah (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022).

Kajian mengenai kinerja keuangan pada provinsi maritim secara bersamaan masih merupakan hal yang baru, khususnya di Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak melakukan kajian pada kinerja keuangan per provinsi atau wilayah tertentu saja. Sementara itu, kajian khusus mengenai wilayah kelautan atau provinsi maritim masih merupakan hal yang jarang dilakukan. Padahal, provinsi maritim memiliki potensi yang besar, khususnya dalam hal sumber daya alamnya. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Zukhri (2020) hanya melakukan kajian kinerja keuangan pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu pula dengan Palupi et al. (2022), hanya berfokus pada Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian dari Tatroman et al. (2023), juga hanya berfokus pada Provinsi Maluku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah secara komprehensif pada provinsi maritim yang tergabung dalam BKSDK. Selain itu, penelitian ini juga melakukan klusterisasi kinerja keuangan berdasarkan 3 wilayah Indonesia, yakni Wilayah Indonesia Barat (WIB), Wilayah Indonesia Tengah (WITA), dan Wilayah Indonesia Timur (WIT). Ini diperlukan guna menemukan pola kinerja antarwilayah di Indonesia. Hasil kajian secara komprehensif pada wilayah provinsi maritim, baik secara menyeluruh maupun klusterisasi, dapat menjadi pertimbangan bagi daerah yang terindikasi dengan kinerja keuangan kurang baik, khususnya potensi di bidang kemaritiman untuk dapat melakukan *benchmarking* (studi banding).

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merujuk pada evaluasi seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan di sektor publik. Menurut Onibala et al. (2021) dan Harahap (2020) terdapat beberapa rasio keuangan yang dimaksud:

1. Rasio Kemandirian Daerah, memperlihatkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.
2. Rasio Keserasian (Belanja Operasional), perbandingan antara total belanja operasional dengan total belanja daerah.
3. Rasio Keserasian (Belanja Modal), diukur dengan cara membandingkan antara total belanja modal dengan total belanja daerah.
4. Rasio Pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah ataupun sebaliknya mengenai hal-hal yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

Laporan Realisasi Anggaran

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan:

“Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan”.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan pemerintah (pusat/daerah). Kinerja keuangan daerah dengan mudah dapat tercermin dari LRA (Permatasari & Narastri, 2023).

Secara umum, Chartady et al. (2022) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan seberapa jauh pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Laporan ini mencakup rincian pengeluaran dan penerimaan yang telah terjadi selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. Hubungan antara laporan realisasi anggaran dan kinerja keuangan daerah sangatlah erat. Hal tersebut dikarenakan laporan realisasi anggaran memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana publik telah dikelola dan digunakan oleh pemerintah daerah selama periode waktu tertentu. Dengan adanya laporan realisasi anggaran akan memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Jika pengeluaran sesuai dengan alokasi anggaran dan penerimaan memenuhi perkiraan, hal ini menunjukkan bahwa dana telah dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga, dengan adanya laporan realisasi anggaran dapat digunakan untuk melakukan efisiensi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah. Jika terdapat pengeluaran yang berlebihan atau pemborosan, hal ini dapat memengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Laporan realisasi juga mencerminkan keteraturan keuangan pemerintah daerah. Jika terdapat ketidakcocokan antara penerimaan dan pengeluaran yang signifikan, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah dalam manajemen keuangan yang dapat memengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, laporan realisasi

anggaran memainkan peranan penting dalam penggunaan dana publik. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang penggunaan dana, laporan ini memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan bertanggungjawab atas keputusan keuangan yang diambil.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2023. Data diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data LRA yang digunakan terfokus pada beberapa provinsi, yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Obyek Penelitian

Delapan provinsi maritim dipilih untuk menjadi obyek penelitian. Penelitian ini mengambil periode penelitian tahun 2022-2023, dengan asumsi informasi keuangan yang tersaji pada laporan keuangan mencerminkan kondisi ideal serta terbebas dari variabel pengganggu.

Variabel Penelitian

Tabel 1
Variabel Penelitian dan Rumus-rumusnya

Rasio Keuangan Daerah	Rumus
Rasio Kemandirian Daerah	$(\text{Realisasi PAD}) / (\text{Realisasi Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}) \times 100$
Rasio Keserasian (Belanja Operasional)	$(\text{Realisasi Belanja Operasional}) / (\text{Realisasi Belanja Daerah}) \times 100$
Rasio Keserasian (Belanja Modal)	$(\text{Realisasi Belanja Modal}) / (\text{Realisasi Belanja Daerah}) \times 100$
Rasio Pertumbuhan	$(\text{Realisasi PAD Th Sekarang} - \text{Th Lalu}) / (\text{Realisasi PAD Th Lalu}) \times 100$

Teknik Analisis

Setelah keseluruhan data keuangan diolah menggunakan rumus rasio-rasio keuangan, maka langkah selanjutnya adalah mengukur hasil yang diperoleh dengan kriteria-kriteria berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 2
Kriteria Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	≤ 25	Instruktif
Rendah	>25 s.d. 50	Konsultatif
Sedang	>50 s.d. 75	Partisipatif
Tinggi	>75 s.d. 100	Delegatif

Berikut penjelasan terhadap pola hubungan dalam tabel di atas:

- a. Pola hubungan instruktif, merupakan pola hubungan di mana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- b. Pola hubungan konsultatif, merupakan pola hubungan di mana pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam ikut campur tangan terhadap kemandirian daerah karena dinilai sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - c. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola hubungan di mana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena daerah yang tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
 - d. Pola hubungan delegatif, merupakan pola hubungan di mana pemerintah sudah tidak ada ikut campur tangan dan daerah tersebut dinilai sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan otonomi daerah.
2. Rasio Keserasian (Belanja Operasional dan Belanja Modal)
Proporsi umum untuk belanja modal, yaitu 5-20% dari belanja daerah (Mahmudi, 2016). Dengan demikian, sisanya dapat digunakan untuk belanja operasional dan belanja lainnya.
3. Rasio Pertumbuhan
Rasio ini pada umumnya berfungsi untuk mengevaluasi potensi suatu daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai total pendapatan asli daerah yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi akan menghasilkan pertumbuhan yang positif. Artinya, daerah tersebut telah mampu mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan periode satu ke periode selanjutnya. Begitupun sebaliknya, jika semakin tinggi nilai PAD yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhan akan dinilai negatif. Artinya, daerah tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Langkah terakhir dari teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menyajikan data yang telah diolah ke dalam bentuk tabel dan grafik serta menginterpretasikan tabel dan grafik yang telah ditambahkan tersebut ke dalam bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya, hasil interpretasi akan didiskusikan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 3

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Bangka Belitung	47,72%	38,44%
2	Kepulauan Riau	74,77%	87,21%
3	Maluku	24,88%	29,81%
4	Maluku Utara	31,77%	25,39%
5	Nusa Tenggara Barat	76,95%	83,94%
6	Nusa Tenggara Timur	38,67%	49,64%
7	Sulawesi Tenggara	33,61%	40,02%
8	Sulawesi Utara	57,19%	85,84%
Rerata Keseluruhan		48,20%	55,03%

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah pada tabel 3, menunjukkan bahwa selama periode 2022-2023 kinerja tertinggi terdapat pada Pemprov Nusa Tenggara Barat. Ijtihad & Harsono (2024) menjelaskan bahwa Pemprov Nusa Tenggara Barat memang merupakan

wilayah yang diberlakukan otonomi daerah. Dfinubun et al. (2021) menjelaskan bahwa Provinsi Maluku memang menjadi salah satu daerah yang terindikasi kuat berkinerja keuangan rendah akibat program pemekaran daerah. Walaupun demikian, kondisi pascapandemi juga memicu berbagai permasalahan ekonomi yang berimbas pada keuangan daerah.

Apabila dilihat secara keseluruhan, kinerja keuangan 8 provinsi maritim mengenai kemandirian daerah berada di angka 48,20% pada tahun 2022 dan 55,03% pada tahun 2023. Dengan demikian, terdapat tren kenaikan sebesar 6,83% dalam 1 tahun. Jika dikaji menggunakan pola hubungan dengan kemampuan keuangan (pada tabel 2), menunjukkan bahwa 8 provinsi maritim memiliki kemampuan keuangan rendah menuju sedang, sedangkan pola hubungannya adalah konsultatif menuju partisipatif. Pola tersebut menunjukkan bahwa kemandirian dari 8 provinsi maritim masih memiliki dependensi. Pola hubungan tersebut juga mencerminkan kondisi di mana pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam ikut campur tangan terhadap kemandirian daerah karena dinilai sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun, belum sepenuhnya mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berpotensi menimbulkan potensi ketergantungan dan kemampuan keuangan yang sedang sehingga berpengaruh pada proses pembangunan pada provinsi tersebut. Tentunya ini menjadi tantangan untuk dapat menuju Visi Indonesia, yaitu sebagai Poros Maritim Dunia.

b. Analisa Rasio Keserasian

Tabel 4

Hasil Perhitungan Rasio Keserasian

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Rasio Belanja Operasional		Rasio Belanja Modal	
		2022	2023	2022	2023
1	Bangka Belitung	65,58%	62,43%	14,65%	18,19%
2	Kepulauan Riau	36,30%	67,05%	14,37%	14,51%
3	Maluku	67,24%	70,25%	26,57%	24,18%
4	Maluku Utara	72,36%	72,60%	18,40%	17,58%
5	Nusa Tenggara Barat	62,38%	72,84%	22,37%	7,95%
6	Nusa Tenggara Timur	62,23%	68,12%	25,26%	14,58%
7	Sulawesi Tenggara	54,34%	60,89%	32,90%	24,10%
8	Sulawesi Utara	62,02%	67,85%	21,22%	12,55%
	Rerata Keseluruhan	60,31%	67,76%	21,97%	16,71%

Pada tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan rasio keserasian pada 8 provinsi maritim mengenai realisasi belanja operasional dan belanja modal selama periode tahun 2022–2023. Untuk melihat tingkat keserasian di antara belanja operasional dan belanja modal, maka ditetapkan belanja modal sebagai basis dalam membuat penarikan intepretasi. Jika persentase belanja modal mendekati 20%, maka dapat diinterpretasikan bahwa tingkat keserasiannya terhadap belanja operasional adalah sangat tinggi/sangat serasi. Pada dasarnya, rasio keserasian merupakan proporsi umum untuk belanja modal, yaitu 5-20% dari belanja daerah. Artinya, sisa lebih dari belanja modal dapat digunakan untuk belanja operasional dan belanja lainnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan 8 provinsi maritim pada rasio belanja modal berada di angka 21.97% pada tahun 2022 dan 16,71% pada tahun 2023. Meskipun terlihat mengalami penurunan sebesar 5,26%, namun masih mendekati kriteria 20% untuk belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio belanja modal masih serasi. Selain itu, dapat dilihat pada realisasi belanja operasional sebesar 60,31% pada

tahun 2022 dan 67,76% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan terjadi kenaikan pada rasio belanja operasional sebesar 7,45%.

Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Fathiyah et al. (2021), yang menjelaskan bahwa umumnya proporsi belanja operasi selalu mendominasi dari seluruh total belanja daerah, yaitu sekitar 60-90%. Di sisi lain, rasio belanja modal sendiri merupakan komparasi dari jumlah keseluruhan dari belanja modal yang terealisasi dengan jumlah keseluruhan belanja daerah. Dengan demikian, biasanya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5-20%. Dengan demikian, hasil perhitungan rasio belanja operasional dan modal provinsi maritim merupakan hal yang telah seimbang dan normal.

c. Analisa Rasio Pertumbuhan

Tabel 5

Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Bangka Belitung	21,74%	-12,90%
2	Kepulauan Riau	21,80%	25,12%
3	Maluku	41,08%	-40,81
4	Maluku Utara	16,89%	3,99%
5	Nusa Tenggara Barat	21,37%	-4,47%
6	Nusa Tenggara Timur	10,15%	9,71%
7	Sulawesi Tenggara	3,34%	2,64%
8	Sulawesi Utara	11,77%	-0,29%
	Rerata Keseluruhan	18,52%	-2,13%

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio pertumbuhan selama periode 2022-2023, Pemprov Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara yang berhasil mencatat pertumbuhan positif secara konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan, khususnya pada Pemprov Maluku Utara. Pada provinsi lainnya, Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara mengalami penurunan yang cukup ekstrim, bahkan minus di tahun 2023. Namun secara keseluruhan, kinerja keuangan provinsi maritim mengenai pertumbuhan daerah mengalami pertumbuhan positif di tahun 2022 sebesar 18,52% dan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2023 sebesar -2,13%. Suroyo (2023) menjelaskan bahwa kondisi pada tahun 2022-2023 mengalami ekstrim pada bagian keuangan, khususnya pada wilayah maritim di Indonesia. Hal ini dapat diakibatkan dari pascapandemi karena kondisi perekonomian sedang mengalami pemulihan.

2. Analisa Keuangan Daerah Berdasarkan Klasterisasi

Pada bagian ini, kami membagi 8 daerah ke dalam 3 klaster sebagai berikut:

a. Klaster Wilayah Indonesia Barat (WIB)

1) Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 6

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah WIB

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Bangka Belitung	47,72%	38,44%
2	Kepulauan Riau	74,77%	87,21%
	Rerata Keseluruhan	61,25%	62,83%

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio kemandirian daerah WIB, menunjukkan bahwa kinerja gabungan Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau pada tahun 2022-2023 masuk dalam kategori sedang. Hal tersebut berdasar pada hasil rerata keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 61,25% dan tahun 2023 sebesar 62,83%. Dengan demikian, terjadi peningkatan pada rasio kemandirian sebesar 1,58% pada tahun 2022 dan 2023. Kemampuan keuangan menunjukkan pola hubungan yang partisipatif. Artinya, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah tersebut telah memiliki kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Namun, apabila dibandingkan antarprovinsi, Bangka Belitung dengan Kepulauan Riau memiliki perbedaan rasio kemandirian lebih dari 30% pada tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan, walaupun provinsi tersebut terdapat pada wilayah yang sama. Alvaro (2022) dan Candra et al. (2019) memaparkan bahwa alasan rasio kemandirian keuangan daerah pada Kepulauan Riau tinggi disebabkan Provinsi ini memiliki PAD yang lebih besar dari dana transfer pemerintah pusat.

2) Analisa Rasio Keserasian

Tabel 7

Hasil Perhitungan Rasio Keserasian WIB

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Rasio Belanja Operasional		Rasio Belanja Modal	
		2022	2023	2022	2023
1	Bangka Belitung	65,58%	62,43%	14,65%	18,19%
2	Kepulauan Riau	36,30%	67,05%	14,37%	14,51%
	Rerata Keseluruhan	50,94%	64,74%	14,51%	16,35%

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio keserasian daerah WIB, yaitu Pemprov Bangka Belitung dan Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 masuk dalam kategori serasi. Hal tersebut terlihat dari rasio belanja modal mendekati 20%, yaitu 14,51% pada tahun 2022 dan 16,35% pada tahun 2023. Pada masing-masing provinsi pun juga memiliki kesamaan dalam rasio belanja modal. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada rasio belanja operasional secara rerata keseluruhan, yaitu sebesar 50,94% pada tahun 2022 dan 64,74% pada tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan rasio belanja operasional Kepulauan Riau sebesar 30,75% antara tahun 2022 dengan 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2022) dan Palupi et al. (2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa penyebab rasio belanja operasional Kepulauan Riau melonjak. Pertama, adanya peningkatan realisasi belanja di mana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengakomodir belanja anggaran pada tahun anggaran 2022, yang membuat Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-4 dari seluruh Indonesia berdasarkan akumulasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan 18 Juni 2022. Kedua, percepatan belanja APBD yaitu,

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro untuk melakukan percepatan belanja APBD tahun 2022 dengan perbelanjaan yang benar dan tepat. Ketiga, adanya perbaikan biaya operasional di mana perhitungan rerata rasio biaya operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah 78,89%, yang menunjukkan adanya potensi untuk perbaikan biaya operasional. Keempat, karena adanya inflasi yang terjadi pada kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022 telah menyebabkan rasio belanja operasional melonjak.

3) Analisa Rasio Pertumbuhan

Tabel 8

Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan WIB

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Bangka Belitung	21,74%	-12,90%
2	Kepulauan Riau	21,80%	25,12%
	Rerata Keseluruhan	21,77%	6,11%

Berdasarkan pada perhitungan rasio pertumbuhan WIB bahwa terjadi penurunan signifikan pada Pemprov Bangka Belitung dan Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan signifikan tersebut secara rerata keseluruhan kedua provinsi tersebut sebesar 15.66%. Namun, apabila dilihat dari masing-masing provinsi, penurunan signifikan terjadi pada Pemprov Bangka Belitung saja, yaitu sekitar minus 34,64%, sedangkan Kepulauan Riau naik sebesar 3.32%. Perbedaan kontras tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepemimpinan, sumber daya alam maupun manusia, serta faktor eksternal lainnya. Azwar (2023) menjelaskan bahwa kawasan timur Indonesia memang mengalami kemandirian yang rendah, yang mana penerapan desentralisasi fiskal meningkatkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat karena PAD tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah.

b. Klaster Wilayah Indonesia Tengah (WITA)

1) Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 9

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah WITA

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Nusa Tenggara Barat	76,95%	83,94%
2	Nusa Tenggara Timur	38,67%	49,64%
3	Sulawesi Tenggara	33,61%	40,02%
4	Sulawesi Utara	57,19%	85,84%
	Rerata Keseluruhan	51,61%	64,86%

Berdasarkan pada perhitungan rasio kemandirian daerah WITA yang terdiri dari 4 Provinsi, terdapat peningkatan secara rerata keseluruhan selama tahun 2022 dan 2023 sebanyak 13.25%. Pada masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan, khususnya pada Sulawesi Utara yang mengalami peningkatan sebesar 28.65% dalam kurun waktu 2022 dan 2023.

Rerata keseluruhan kemandirian menunjukkan kemampuan keuangan pada level sedang, dengan pola hubungan partisipatif. Artinya, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang serta provinsi pada WITA ini memiliki tingkat kemandirian yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Alfansa & Wibowo (2022) serta Awani & Hariani (2021) menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di Indonesia tengah cenderung sama karena semua daerah di Indonesia timur memiliki sistem otonomi yang sama, yang mengatur kewenangan dan hak-hak pemerintah daerah serta infrastruktur dan kinerja administrasi keuangan yang cenderung sama.

2) Analisa Rasio Keserasian

Tabel 10
Hasil Perhitungan Rasio Keserasian WITA

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Rasio Belanja Operasional		Rasio Belanja Modal	
		2022	2023	2022	2023
1	Nusa Tenggara Barat	62,38%	72,84%	22,37%	7,95%
2	Nusa Tenggara Timur	62,23%	68,12%	25,26%	14,58%
3	Sulawesi Tenggara	54,34%	60,89%	32,90%	24,10%
4	Sulawesi Utara	62,02%	67,85%	21,22%	12,55%
	Rerata Keseluruhan	60,24%	67,43%	25,44%	14,80%

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio keserasian pada provinsi maritim daerah WITA pada tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam kategori serasi (mendekati 20%). Namun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023 secara rerata keseluruhan sebesar 10,64%. Sedangkan pada rasio belanja operasional secara rerata keseluruhan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,19%. Sukama (2020) menjelaskan bahwa wilayah provinsi di WITA memiliki kesamaan dalam karakteristik pembangunannya, sehingga bagian operasional dan belanja modal rata-rata mengalami kesamaan. Juni (2020) menjelaskan bahwa daerah WITA memiliki sumber daya alam dan manusia yang senada serta proses pemerintahan yang sama sehingga menyebabkan belanja operasional dan modal seimbang. Hal ini juga selaras dengan penelitian dari Sukroso (2019) dan Caki (2023).

3) Analisa Rasio Pertumbuhan

Tabel 11
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan WITA

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Maluku	41,08%	-40,81%
2	Maluku Utara	16,89%	3,99%
	Rerata Keseluruhan	28,95%	-18,41%

Tabel 11 menampilkan kinerja Pemprov yang tergabung ke dalam kluster WITA mengenai pertumbuhan daerah selama periode 2022-2023. Hasilnya, kinerja gabungan untuk kedua provinsi (Maluku dan Maluku Utara) pada periode 2022-2023 mengalami tren pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun.

c. Klaster Wilayah Indonesia Timur (WIT)

1) Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 12
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah WIT

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Maluku	24,88%	29,81%
2	Maluku Utara	31,77%	25,39%
	Rerata Keseluruhan	28,33%	27,60%

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio kemandirian daerah WIT tahun 2022-2023 yang terdiri dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara, menunjukkan rerata keseluruhannya adalah 28,33% pada tahun 2022 dan 27,60% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kemandirian daerah sebesar 0,73%. Perhitungan rasio demikian menunjukkan bahwa kemandirian daerah WIT masih dalam kategori rendah dan memiliki pola hubungan yang konsultatif. Artinya, peranan pemerintah pusat mulai berkurang dalam ikut campur tangan terhadap kemandirian daerah karena dinilai sedikit lebih mampu melaksanakan otonom daerah. Arief (2020) menjelaskan bahwa daerah WIT memiliki kecenderungan dalam sumber daya alam dan manusia yang sama. Hal ini juga selaras dengan penelitian dari Agung (2023). Namun, jika dikaji per provinsi, peningkatan rasio kemandirian hanya terjadi pada provinsi Maluku, sedangkan Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 6,38%.

2) Analisa Rasio Keserasian

Tabel 13
Hasil Perhitungan Rasio Keserasian WIT

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Rasio Belanja Operasional		Rasio Belanja Modal	
		2022	2023	2022	2023
1	Maluku	67,24%	70,25%	26,57%	24,18%
2	Maluku Utara	72,36%	72,60%	18,40%	17,58%
	Rerata Keseluruhan	69,80%	71,43%	22,49%	20,88%

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasional dan belanja modal pada tahun 2022-2023 di WIT, menunjukkan bahwa kinerja gabungan kedua provinsi masuk dalam kategori serasi karena mendekati 20%. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Ijon (2022) dan Caju (2023) menjelaskan bahwa Maluku dan Maluku Utara memiliki keserasian dalam rasio belanja operasional dan belanja modal.

3) Analisa Rasio Pertumbuhan

Tabel 14
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan WIT

No.	Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Kinerja 8 Pemprov	
		2022	2023
1	Maluku	41,08%	-40,81
2	Maluku Utara	16,89%	3,99%
	Rerata Keseluruhan	28,99%	-18,41%

Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio pertumbuhan WIT pada tahun 2022 dan 2023 di Pemprov Maluku dan Maluku Utara menunjukkan bahwa terjadi penurunan ekstrim. Penurunan tersebut secara rerata keseluruhan sebesar 47,4%. Sementara itu, apabila melihat dari masing-

masing Pemprov, terlihat yang mengalami penurunan rasio pertumbuhan secara ekstrim adalah Pemprov Maluku, yaitu sebesar 81,89%, sedangkan Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 12,9%. Awani & Hariani (2021) menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di WIT cenderung menurun karena PAD cenderung rendah, infrastruktur dan pelayanan publik yang kurang baik sehingga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang rendah serta manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

Secara keseluruhan, rasio kemandirian daerah pada 8 provinsi maritim pada level rendah menuju sedang. Jika melihat rasio kemandirian daerah per wilayah, yaitu WIB, WITA, dan WIB, menunjukkan bahwa terjadi adanya ketimpangan antarprovinsi pada wilayah WIB, sedangkan adanya kestabilan rasio kemandirian antarprovinsi secara konsisten pada wilayah WITA. Justru terjadi penurunan secara bersamaan pada wilayah WIT. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan terlihat rasio kemandiriannya hampir sama, namun masing-masing wilayah menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan kemandirian keuangan masing-masing daerah bergantung dari bagaimana pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serta tingkat optimalisasi pengelolaan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Syam & Zulfikar, 2022). Lebih lanjut, Azwar (2023) turut menjelaskan bahwa terdapat beberapa penyebab utama rendahnya kemandirian daerah di suatu provinsi. Di antaranya adalah potensi PAD yang rendah di daerah tersebut serta beban belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup besar selama periode desentralisasi fiskal. Pada dasarnya, komponen penting dalam meningkatkan kemandirian daerah adalah pengelolaan APBD yang lebih logis dan menghasilkan investasi. Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran operasional terutama belanja pegawai terus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lembaga pemerintah dan birokrasi. Dengan demikian, efisiensi belanja menjadi faktor utama dalam mencapai aspek kemandirian daerah ini dapat dicapai melalui pembuatan anggaran partisipatif yang mendukung kinerja aparatur.

Dengan demikian, apabila melihat rasio keserasian dari belanja operasional dan belanja modal, secara keseluruhan justru 8 provinsi maritim ini memiliki keserasian yang baik. Hal tersebut terlihat dari rerata belanja modal mendekati 20%. Rasio belanja operasional mengalami peningkatan, sedangkan rasio belanja mengalami penurunan secara rerata keseluruhan. Rasio belanja operasional mengalami peningkatan, sedangkan rasio belanja modal mengalami penurunan secara rerata keseluruhan. Namun, apabila melihat dari per wilayah terjadi peningkatan pada rasio belanja operasional, sedangkan rasio belanja modal turun dan konsisten. Soleh (2015) menjelaskan bahwa rasio belanja operasi mengalami peningkatan, dapat disebabkan semakin tingginya realisasi belanja operasi.

Mengenai rasio pertumbuhan, secara rerata keseluruhan 8 provinsi maritim di Indonesia mengalami penurunan, bahkan mencapai angka minus, sedangkan jika melihat dari masing-masing wilayah juga mengalami penurunan, walaupun terdapat beberapa provinsi yang justru naik, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Bappeda (2023) dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023) menjelaskan bahwa alasan rasio pertumbuhan provinsi maritim di tahun 2022 dan justru minus di tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pandemi COVID-19 telah memengaruhi ekonomi global, termasuk ekonomi provinsi di daerah kelautan. Beberapa sektor, seperti perikanan, perkebunan, dan peternakan, yang biasanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi di daerah kelautan, mungkin telah mengalami dampak negatif dari pandemi. Kedua, kontraksi ekonomi global dapat memengaruhi ekspor dan impor, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi provinsi di daerah kelautan. Jika ekspor dan impor mengalami kontraksi, maka pertumbuhan ekonomi provinsi di daerah kelautan juga akan

mengalami dampak negatif. Ketiga, pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rendah atau minus sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi di daerah kelautan juga akan mengalami dampak negatif. Keempat, pertumbuhan industri melemah. Kelima, pengeluaran PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran melemah. Keenam, pengeluaran konsumsi melemah, dan ketujuh adalah persentase penduduk miskin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi di provinsi daerah kelautan juga akan mengalami dampak negatif. Hal ini juga diperkuat dari *press release* dari BPS tahun 2023 dan 2024. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa provinsi maritim di Indonesia memiliki kinerja keuangan yang sedang sehingga memungkinkan adanya potensi untuk dapat meningkatkan menuju level lebih tinggi dalam rangka mencapai visi Indonesia, yaitu menyongsong poros maritim dunia pada tahun 2045.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, kinerja keuangan pada provinsi maritim Indonesia pada level sedang. Hal tersebut terlihat dari aspek rasio kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa level rendah menuju sedang. Pada aspek rasio keserasian menunjukkan keserasian dengan rasio belanja operasional yang semakin meningkat dan rasio belanja modal yang semakin menurun. Pada aspek rasio pertumbuhan mengalami penurunan ekstrim hingga minus secara rerata keseluruhan. Pada masing-masing wilayah memiliki kesamaan, yaitu rasio keserasian yang stabil, rasio pertumbuhan yang semakin menurun, dan rasio kemandirian daerah yang berbeda di tiap wilayah Indonesia.

KETERBATASAN DAN SARAN

Tulisan ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lagi, baik dari sisi metodologi maupun tujuan penelitian yang lebih spesifik. Kami menyadari tulisan ini cukup sederhana, namun substansial sehingga kami berharap akan ada lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang menyoroti isu keuangan di daerah-daerah kepulauan (maritim), tentunya dengan sudut pandang dan desain penelitian yang komprehensif. Keterbatasan memaparkan hal-hal yang sebenarnya tercakup didalam lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu, tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan kajian mendalam mengenai masing-masing rasio pada tiap provinsi maritim di Indonesia. Di samping membuka peluang eksplorasi mengenai strategi peningkatan kinerja keuangan publik, khususnya pada wilayah provinsi maritim di Indonesia. Secara teori, ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kajian mengenai pengembangan pengelolaan keuangan sektor publik serta memberikan masukan dalam hal kebijakan dan strategi bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansa, R., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 150–168.
- Alvaro, R. (2022). Gambaran Kemampuan Keuangan Provinsi di Wilayah Barat Indonesia dan Kebijakan pada Transfer ke Daerah Tahun 2010-2020. *Jurnal Budget*, 7(1), 56–75.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95–102.

- Ayu Permatasari, P., & Narastri, M. (2023). Analysis of Budgeting and Budget Realization Reports in View of Regional Regulation Number 9 of 2021 (Case Study of The Surabaya Population and Civil Registration Service). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1652–1659.
- Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Realisasi Belanja Pemprov Kepri Semester I-2022 Terbaik Keempat se-Indonesia*. <https://kepri.bpk.go.id/realisasi-belanja-pemprov-kepri-semester-i-2022-terbaik-keempat-se-indonesia/>
- Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 146–159.
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. *Open Journal Systems*, 17(1), 93–100.
- Difinibun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau dari Rasio dan Indeks Keuangan. *Fair : Financial & Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–80.
- Fathiyah, F., Sukmana, A., & Majid, H. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public Sector Innovation in Local Government and Its Impact on Development Outcomes: Empirical Evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(12), 1–13.
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Rauhul Ijtihad. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1), 41–50.
- Kelen, J. (2019, June 12). *Delapan Provinsi Kepulauan Sepakat Membentuk BKSDK*. <https://www.beritasatu.com/nasional/416125/delapan-provinsi-kepulauan-sepakat-bentuk-bksdk>.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 22, Issue 2).
- Palupi, D., Dassaad, Riyanti, & Wahyudi, B. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi COVID 19 Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 1819–1832.
- Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Ekombis Review*, 28–38.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.
- Tatroman, A., Monierdin, K., & Digidowiseso, K. (2023). Analisis Kualitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017-2021. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2317–2330.
- Wibawa, A., Antarini, L., & Marsitadewi, K. E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 20–34.

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review*, 5(5), 143–149.